

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB DOMPU**

**TAHUN 2023
SEMESTER I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan berkat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 Semester I dapat disusun tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 Semester I merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target-target dalam pelaksanaan penetapan kinerja sifatnya mengikat untuk dicapai dan dipertanggung jawabkan. Target-target tersebut mengarah sasaran dan tujuan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan (*performance gap*) yang secara signifikan kurang atau melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan secukupnya sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 Semester I ini berisi informasi tentang capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2023.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek -aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

Dompu, 24 Mei 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Dompu



H. A. HALIK

NIP. 196712311989031005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
- Umum	6
- Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasarakatan.....	7
- Struktur Organisasi	8
- Wilayah Kerja	13
- Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi	13
B. Dasar Hukum	14
C. Maksud dan Tujuan.....	16
D. Sistematika Pelaporan.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Perencanaan Kinerja	18
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Langkah / Rencana Tindak Lanjut	49
PERJANJIAN KINERJA.....	51
SK TIM PENYUSUN LKJIP	56
FOTO-FOTO	59
DATA DUKUNG LAINNYA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	11
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	11
Tabel 1.5 Jumlah Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompu.....	12
Tabel 1.6 Rincian Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompu.....	12
Tabel 1.7 Tabel Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi.....	13
Tabel 2.1 Rencana Strategis.....	18
Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja.....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu.....	21
Tabel 3.2 Periode Penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM).....	23
Tabel 3.3 Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas Kelas IIB Dompu.....	23
Tabel 3.4 Persentase Penurunan Tahanan yang Overstaying.....	24
Tabel 3.5 Jumlah Tahanan/Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	24
Tabel 3.6 Jumlah Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum.....	25
Tabel 3.7 Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan.....	25
Tabel 3.8 Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi.....	25
Tabel 3.9 Capaian Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi.....	26
Tabel 3.10 Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.....	26
Tabel 3.11 Pengaduan yang Masuk dan sudah di Tindak Lanjuti.....	27
Tabel 3.12 Pencegahan Gangguan Kamtib.....	27
Tabel 3.13 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib.....	28
Tabel 3.14 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.....	29
Tabel 3.15 Data Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak.....	29
Tabel 3.16 Data Kesehatan Narapidana Dan Tahanan Tahun 2023.....	30
Tabel 3.17 Jumlah Tahanan Dan Narapidana Sakit Yang Ditangani.....	30
Tabel 3.18 Data Jumlah Tahanan/WBP (Ibu Hamil dan Menyusui).....	31
Tabel 3.19 Data Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Mengalami Gangguan Mental.....	31

Tabel 3.20 Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	31
Tabel 3.21 Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB	32
Tabel 3.22 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023	32
Tabel 3.23 Perbandiang Realisasi kinerja	33
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dalam Dokumen Renstra	42
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Tahun 2023	44
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	48



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu tahun 2023 disusun merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penetapan kinerja yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010.

A. Latar Belakang

- Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan salah satu unit Pelaksanaan Teknis di Bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen - komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan perwujudan pertanggung jawaban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

- Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasarakatan

1. **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Lembaga pemasarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas dan fungsi :

I. TUGAS

Melaksanakan Pemasarakatan Narapidana/Anak.

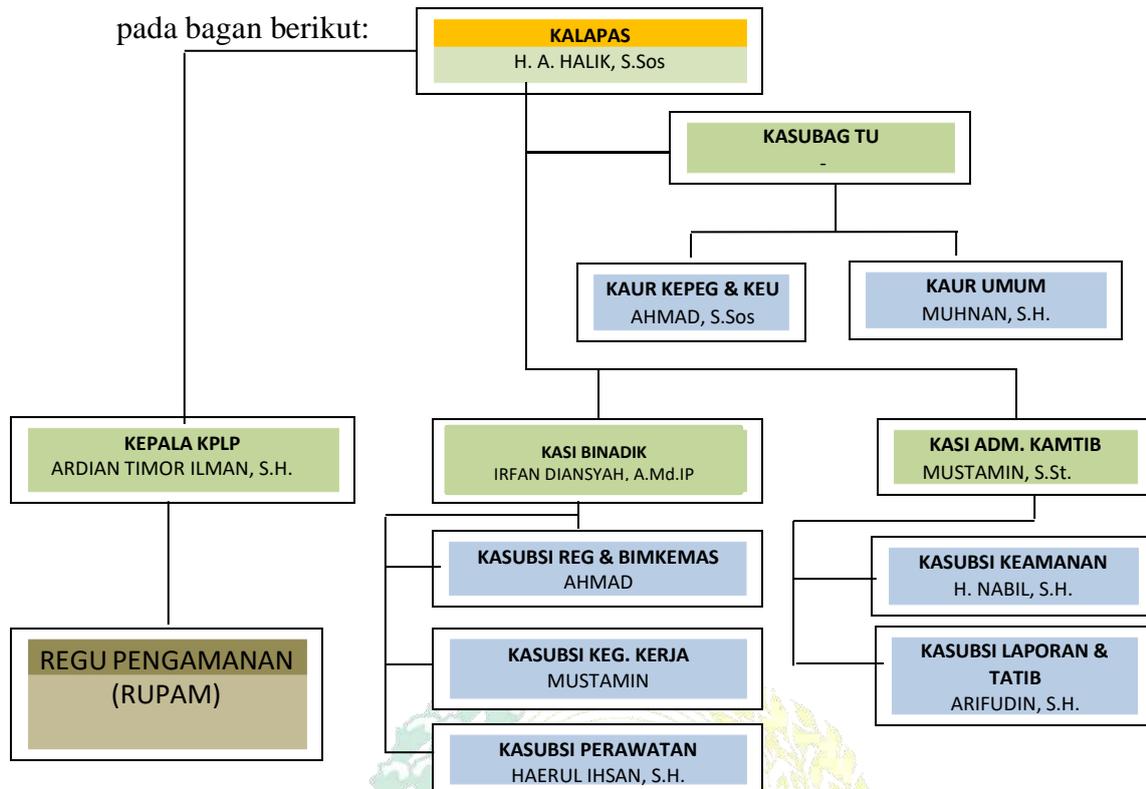
II. FUNGSI

Fungsi Lembaga Pemasarakatan menurut Kepmen Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 pasal 2 sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/Anak Didik
- b. Memberikan Bimbingan, mempersiapkan Sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/Kerohanian Narapidana/Anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemasarakatan
- e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

- Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Dompu dapat dilihat pada bagan berikut:



I. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
 - Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik.

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

III. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

IV. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas.dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

URAIAN DATA KEPEGAWAIAN LAPAS KELAS IIB DOMPU

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1	Pengatur Muda	II/a	20	
2	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	
3	Pengatur	II/c	1	
4	Pengatur Tk.I	II/d	3	
Sub Total			27	
6	Penata Muda	III/a	8	
7	Penata Muda Tk.I	III/b	21	
8	Penata	III/c	8	
9	Penata Tk.I	III/d	5	
Sub Total			42	
11	Pembina	IV/a	1	
12	Pembina Tk.I	IV/b	0	
Sub Total			1	
Total			70	

Table 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SLTA	41	
4	D1	-	
5	D2	-	
6	D3	3	
7	D4	-	
8	S1	26	
9	S2	-	
10	S3	-	
Total		70	

Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
1	Pria	67	1 Orang CLTN
2	Wanita	3	
Total		70	

Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Jabatan Struktural	10	1 Orang CLTN
2	Jabatan Fungsional Tertentu	2	
3	Jabatan Fungsional Umum	58	
Total		70	

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai tahun 2023 pada Lapas kelas IIB Dompu dibutuhkan 143 pegawai. Namun pada saat ini jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 70 pegawai. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 73 pegawai.

Tabel 1.5

Jumlah Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompu

NO	NAMA UPT	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI (3-4)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU	143	70	73	

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6

Rincian Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompu

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI	PEGAWAI YANG TERSEDIA	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kekurangan Pegawai
1	2	3	4	5	6
1	Kepala lapas	1	1	S1	0
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	S1	0
3	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuanagan	1	0	S1	1
4	Staf Urusan Kepegawaian dan Keuanagan	9	9	S1,SMA/SMK SEDERAJAT	0
5	Kepala Urusan Umum	1	1	S1	0
6	Staf Urusan Umum	3	2	SMA/SMK SEDERAJAT	1
7	Kasi Binadik	1	1	S1	0
	Staf Binadik	1	0	SMA/SMK SEDERAJAT	1
8	Kepala Subseksi Perawatan	1	1	S1	0
9	Staf Perawatan	3	3	S1, SMA/SMK SEDERAJAT	0
10	Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas	1	1	POLTEKIP/ S1	0
11	Staf Registrasi dan Bimkemas	10	6	SMA/SMK SEDERAJAT	4
12	Kepala Subseksi Kegiatan Kerja	1	1	S1	0
13	Staf Kegiatan Kerja	7	5	SMA/SMK SEDERAJAT	2
14	Ka. KPLP	1	1	POLTEKIP/ S1	0
15	Staf KPLP	3	1	POLTEKIP/ SMA/SMK SEDERAJAT	2
16	Kasi Adm. Kamtib	1	1	S1	0
17	Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata tertib	1	1	S1	0
18	Staf Subseksi Pelaporan dan Tata tertib	2	1	SMA/SMK SEDERAJAT	1
19	Kepala Subseksi Keamanan	1	1	S1	0

20	Staf Subseksi Keamanan	5	2	SMA/SMK SEDERAJAT	3
21	Jabatan Fungsi Tertentu	7	3	S1, SMA/SMK SEDERAJAT	4
22	Keamanan	81	27	SMA/SMK SEDERAJAT	53
JUMLAH					73

- Wilayah Kerja

Lapas Kelas IIB Dompu merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja yang meliputi 8 Kecamatan, di antaranya :

1. Kecamatan Dompu
2. Kecamatan Huú
3. Kecamatan Kempo
4. Kecamatan Kilo
5. Kecamatan Manggelewa
6. Kecamatan Pajo
7. Kecamatan Pekat
8. Kecamatan Woja

- Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

Tabel 1.7
Tabel Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

No.	Bagian	Permasalahan
1	Sub Bagian TU	
	Urusan Kepegawaian & Keuangan	a. Kurang memadainya perlengkapan Perkantoran seperti Meubeler, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy. b. Minimnya SDM yang handal untuk mengelola aplikasi.
	Urusan Umum	a. Rusaknya bangunan gedung aula karena bencana alam. b. Mobil dan kendaraan dinas yang sudah rusak berat. c. Minimnya sarana untuk ketersediaan air bersih. d. Tidak tersedianya Mobil Tangki Air. e. Instalasi listrik yang sudah tidak layak sehingga sering terjadinya konsleting listrik.
2	Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik	

	Subseksi Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya fasilitas transportasi pasien (Ambulance) untuk melakukan rujukan keluar Lapas menuju Rumah Sakit terdekat. b. Terbatasnya ruangan pemeriksaan dan Ruang Rawat Inap c. Belum tersedianya tenaga dokter. d. Belum tersedianya alat sterilisator alat medis. e. Kurangnya alat tandu yang memadai.
3	Seksi Adm. Kamtib	
	Keamanan Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Alat Komunikasi jarak pendek seperti Handy Talky (HT). b. Masih kurangnya Alat Pemadam Kebakaran. c. Minimnya Alat Pemantau Pengamanan Seperti Senter.
4	KPLP	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sarana borgol belunggu dan tongkat T. b. Jumlah personil regu jaga yang minim sehingga sulitnya melakukan rolling tugas dan pos-pos yang kosong (terutama pos atas) dalam kondisi tertentu (anggota sakit/ cuti). c. Kurangnya sarana pendukung lainnya seperti payung, jas hujan, senter dan metal detector. d. Kebutuhan MCK di musim kemarau seperti debit air bersih kurang di musim kemarau dan air PDAM keruh di musim penghujan, sehingga sewaktu-waktu dapat memicu gangguan kamtib. e. Masih kurangnya CCTV pada titik strategis. f. Grawang pembatas blok dan kawat berduri tembok keliling yang sudah tidak layak.

B. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaa tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang – Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No : M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019.
19. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP.

C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala - kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha - usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

D. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Lapas Kelas IIB Dompu tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan wewenang Pemasyarakatan, struktur organisasi, wilayah kerja dan isu strategis yang dihadapi organisasi. Selain itu menjelaskan dasar hukum, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan Sistematika penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 semester I serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tabel. 2.1
Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	Indeks keamanan dan ketertiban UPT masyarakat	80
2	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan public.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1 %

B. Perencanaan Kinerja

Tabel. 2.2
Perencanaan Kinerja

No.	Program	Kegiatan	KRO	Target Volume Output	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	408 Orang	3.346.980.000	3.346.980.000

			Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	73.980.000	73.980.000
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	5.405.818.000	5.404.058.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Interna	1 Unit	69.965.000	69.965.000
			Layanan Manajemen SDM	72 Orang	9.780.000	9.780.000
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	59.860.000	59.860.000



C. Perjanjian Kinerja

Tabel.2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	85
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80 %
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80 %
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70 %
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85 %
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31 %
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85 %
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80 %
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85 %
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96 %

		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	85 %
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.	85 %
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).	80 %
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.420.960.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.545.423.000
	JUMLAH	Rp. 8.966.383.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu tahun 2023 semester I dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan.

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi %	Capaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	85	100 %	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	85%	5 Kasus	85%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	85%	50 Orang	95%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	85%	22 Orang	85 %
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi,	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada	70 %	300 Orang	100 %

	Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Instrument Penilaian Kepribadian			
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	276	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	67	85%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	85 %	100	100
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31 %	-	100
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	100	75
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85 %	100	100
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80 %	100	100
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85 %	100	95
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %	100	95
5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100	100
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	100	100
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %	100	100
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	100	100

		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	100	100
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	100
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	100	100
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100 %	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100 %	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	100 %	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100 %	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100 %	1 Layanan

- Analisi Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah.

a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dijadikan salah satu sasaran kegiatan pemasyarakatan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari indikator yaitu: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.2

Periode Penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Periode (2023)	Nilai IKM
1	Januari	17,18
2	Februari	17,09
3	Maret	17,24
4	April	16,93
5	Mei	17,07
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
Rata-rata		17.10

Sehingga Nilai Indeks yang diperoleh di tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= \frac{17}{20} \times 100 \\ &= 85 \end{aligned}$$

Capaian kinerja Lapas Kelas IIB Dompu dalam Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah pada tahun 2023 menunjukkan menunjukkan angka

sebesar 85 dari target yang di tentukan sebesar 85. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan pada lapas Kelas IIB Dompu sudah mampu memenuhi target dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesua Standar.

a. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Lapas Kelas IIB Dompu memiliki kapasitas hunian sebesar 148 orang, namun saat ini jumlah Tahanan/Narapidana sampai dengan 24 Mei 2023 sebanyak 375 orang dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas Kelas IIB Dompu

No	Kapasitas Lapas	Jumlah Penghuni Lapas	
		Pria	Wanita
	148		
1	Narapidana	306	0
2	Tahanan	66	3
	Sub Total	372	3
	Jumlah	375	

Tujuan indikator kerja menurunnya tahanan yang overstaying adalah menunjukkan seberapa besar keberhasilan penanganan masalah overstaying yang sering menjadi permasalahan. Hal ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya overcrowded.

Tabel. 3.4

Persentase Penurunan Tahanan yang Overstaying

No.	Uraian	2022	2023
1	Jumlah Tahanan yang Overstaying	6	5
Persentase Penurunan			70 %

Jumlah Tahanan yang overstaying pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus. Lalu tahun 2023 Tahanan yang overstaying sebanyak 5 kasus sehingga ada penurunan kasus overstaying dibanding tahun lalu. Namun terdapat beberapa kendala yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam proses pengiriman penetapan/ putusan MA, sering terjadi keterlambatan dalam eksekusi putusan oleh jaksa

Dengan begitu persentase penurunan dibanding tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Penurunan ovrstaying} \\
 & = \frac{\text{Jumlah overstaying tahun 2022} - \text{Jumlah overstaying tahun 2023}}{\text{Jumlah overstaying tahun 2022}} \\
 & = \frac{6 - 5}{6} \times 100\% \\
 & = 16 \%
 \end{aligned}$$

Target dari indikator ini sebesar 16 %, satker memperoleh 16 % , sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

b. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyuluhan hukum dari LBH Kab. Dompu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Tahanan/Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Jumlah Tahanan/Narapidana	Jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum
66	22

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 85% atau 22 orang dari 92 tahanan/narapidana.

$$\begin{aligned}
 & \textit{Persentase Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana}} \\
 & = \frac{22}{24} \times 100\% \\
 & = 85 \%
 \end{aligned}$$

c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bantuan hukum kepada Tahanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Jumlah Tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum	Jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum
60	50

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 85% atau 50 orang dari 60 tahanan.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.

a. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian.

Tabel 3.7

Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan

Jumlah WBP	Predikat
300	Memuaskan
-	Baik
-	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Tahanan/Narapidana pada Lapas Kelas IIB Dompu adalah 375 orang, sedangkan yang memperoleh nilai baik dengan predikat Memuaskan sebanyak 300 orang, predikat Baik sebanyak 0 orang dan predikat Cukup sebanyak 0 orang. Target dari indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 70 %. Sehingga capaian dari indikator ini sebesar 90 % dan sudah melebihi target.

b. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Tabel 3.8

Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

No.	Jumlah Usulan WBP yang Mendapatkan Remisi	WBP yang Mendapatkan Remisi
1	276	276

Berdasarkan tabel di atas, jumlah WBP yang diusulkan untuk memperoleh remisi sebanyak 276 orang dan 276 orang tersebut mendapatkan remisi. Target dari indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100 %.

c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Tabel 3.9

Capaian Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

No.	Kontent	Status	Capaian
1	Pembebasan Bersyarat	100 %	100 %
2	Cuti Bersyarat	100 %	
3	Assimilasi Rumah	100 %	

Sesuai dengan tabel di atas maka diperoleh capaian sub indikator pada tahun 2023 dengan menjumlahkan masing-masing capaian yaitu sebesar :

$$= \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$= 100$$

Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 75 %. Capaian dari indikator ini sudah melebihi target yaitu 100 %.

- d. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin.

Di tahun 2023 Tidak ada Narapidana Risiko Tinggi di Lapas Kelas IIB Dompu sehingga tidak diperlukan tindak lanjut. Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

- e. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.

Tabel 3.10

Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Sertifikat
1	Pertanian dan Perkebunan Padi, Jagung dan Kacang Hijau	0	0
Jumlah		0	0

Pada tahun 2023 Lapas Kelas IIB Dompu target Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat sebanyak 40 orang. Dari data di atas, belum ada kegiatan yang dilakukan

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar.

- a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar.

Lapas Kelas IIB Dompu telah memiliki media pengaduan dan SDM yang menangani pengaduan. Dan selama tahun 2023 ini capaian pengaduan yang ditindaklanjuti diberikan dalam table berikut.

Tabel 3.11

Pengaduan yang Masuk dan sudah di Tindak Lanjuti

No.	Jalur Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang di Tindak Lanjuti
1	Email	-	-
2	WA	-	-
3	Website	-	-
4	Kotak Pengaduan	-	-
5	Nomor Pengaduan	-	-
6	Google Form	-	-

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang diterima dari masyarakat melalui berbagai media yang telah disediakan oleh Lapas Kelas IIB Dompus. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pengaduan pada tahun 2023 sehingga tidak diperlukan tindak lanjut khusus. Telah dicapai target yang ditentukan.

b. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Tabel 3.12

Pencegahan Gangguan Kamtib

No.	Uraian	Target Operasi	Jumlah Operasi
1	Pencegahan Gangguan Kamtib (Penggeledahan)	24	24

Dari tabel data di atas pada tahun 2023 target operasi penggeledahan yang ditetapkan adalah 48 operasi. Persentase yang dicapai sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya, penggeledahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 pada Lapas Kelas IIB Dompus sebanyak 45 operasi baik penggeledahan rutin maupun insidental. Kegiatan penggeledahan rutin maupun penggeledahan insidental dilaksanakan sebagai langkah preventif pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta mencegah beredarnya Narkoba di dalam Lapas Kelas IIB Dompus. Dalam setiap penggeledahan yang dilaksanakan seringkali yang ditemukan adalah pecahan cermin, paku, korek api, silet, botol kaca, sendok besi, kurisan, tali dan

batu dan tidak pernah di temukan adanya narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pada Lapas Kelas IIB Dompu sudah bebas dari peredaran narkoba.

- c. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai bentuk kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib sebagai berikut :

Tabel 3.13

Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

No.	Jenis Pelanggaran Tata Tertib	Waktu Kejadian	Tindak Lanjut
1	Perselisihan WBP (1 Kasus)	13-04-2023	➤ Diperiksa ➤ Buat Surat Pernyataan

Sehingga untuk mengukur capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 CKK &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran WBP yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran WBP}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Sehingga capaian dari indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan 100%.

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Tabel.3.14

Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No.	Jenis Pelanggaran Tata Tertib	Langkah yang Diambil	Tindak Lanjut
1	Perselisihan WBP	➤ Sosialisasi kepada Tahanan/Narapidana/Anak tentang kerukunan hidup bersama, saling membantu dalam hal-hal yang positif.	Sudah ditindaklanjuti



Pada tahun 2023 terdapat 1 kasus pelanggaran tata tertib. Dari 1 kasus yang terjadi ke 1 kasusnya telah ditindaklanjuti. Sehingga persentase capaiannya indikator ini sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah.

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Tabel. 3.15

Data Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak

No.	Bulan	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
1	Januari	11.652
2	Februari	10.697
3	Maret	11.652
4	April	11.353
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-
JUMLAH		45.354

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidanan/Anak sebesar 100% telah dilaksanakan secara menyeluruh. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pada Tahun 2023 berdasarkan hari tinggal adalah 45.354 orang. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan pemenuhan layanan makanan adalah 45.354 orang. Sehingga capaiannya adalah 100 %.

- b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Tabel 3.16

Data Kesehatan Narapidana Dan Tahanan Tahun 2023

Sakit gigi	HIV /AI DS	Penyakit pendengaran	Hepatitis	Penyakit pernapasan	Penyakit pencernaan	Penyakit ginjal dan saluran kemih	Penyakit susunan saraf	Penyakit jantung dan pembuluh darah	Diabetes	Hipertensi	Gangguan jiwa /depresi	Penyakit lain Gatal-gatal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	2	10	7	55	30	7	0	1	3	5	2	80	125

Tabel 3.17

Jumlah Tahanan Dan Narapidana Sakit Yang Ditangani

Jumlah Tahanan Dan Narapidana	Jumlah Yang Sakit Tahun 2023	Jumlah Yang Ditangani	Jenis Penanganan	Jumlah
375	125	125	Rawat Jalan	125
			Rawat Inap Diklinik Lapas	2
			Rawat Inap Diluar Lapas	2
			Jumlah	129

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah 100% atau 129 tahanan dan Narapidana yang sakit dan telah dilakukan penanganan pada tahun 2023 telah ditangani.

- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Tabel 3.18

Data Jumlah Tahanan/WBP (Ibu Hamil dan Menyusui)

No.	Jumlah Tahanan/WBP (Ibu Hamil dan Menyusui)	Jumlah yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
1	-	-

Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan tidak ada Tahanan/Narapidana wanita di tahun 2023 semester I yang sedang kondisi hamil atau memiliki anak bawaan. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut. Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 97%. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yaitu 100% yang telah ditetapkan.

- d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Tabel 3.19

Data Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Mengalami Gangguan Mental

No.	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang di Tindak Lanjuti
1	2	2

Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini dengan memberikan pengobatan rutin kepada Tahanan/Narapidana sejumlah 2 orang yang memiliki gangguan mental di tahun 2023. Obat rutin diberikan langsung oleh keluarga yang di ambil melalui Puskesmas Dompus Barat. Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 80 %. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan 100%.

- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.20

Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jenis Kelamin	Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan
Laki-laki	16	16
Wanita	0	0
Jumlah		16

Berdasarkan tabel diatas jumlah lansia yang ada pada Lapas Kelas IIB Dompu adalah 16 orang dan telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 100 %.

- f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).

Indikator kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 80 % untuk penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB dan Data diberikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.21

Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB

No.	Uraian Penyakit	Jumlah	Jumlah yang di Tangani
1	HIV-AIDS	2	2
2	TB	0	0

Berdasarkan data tersebut diatas Tahanan/Narapidanan telah mendapatkan penanganan. Sehingga capaian target indikator kinerja kegiatan adalah 100 %.

- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

Tabel 3.22

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

No/Kode	Program	Klasifikasi Rincian Output	Target Volume	Realisasi Volume	Persentase Capaian
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah				
5252.BDC		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	370 Orang	370 Orang	100%
5252.BHB		Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	12 Operasi	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

013.05.WA	Program Dukungan Manajemen				
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan				
6231.EBA		Layanan dukungan manajemen internal	4 Layanan	4 Layanan	100%

6231.EBB		Layanan sarana dan prasarana internal	1 unit	1 unit	100%
6231.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	72 Orang	72 Orang	100%
6231.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

- Analisis Capaian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2023 diatas dicapai pelaksanaan target volume 100 %. dan KRO yang lainnya menunjukkan capaian pelaksanaan target volume telah mencapai 100%. Sehingga Rata-rata capaian yang diperoleh sebesar 100 %.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.

Tabel. 3.23

Perbandingan Realisasi kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	85	83	85	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	85%	6 Kasus	85	70	85
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	85%	66 Orang	85	72	85
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	85%	59 Orang	85	72,84	85

3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	65%	70	100%	85	65	100
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	99	100%	100	98	100
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	85	100%	85	80	100
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	15%	85	100%	85	15	100
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	31	100%	-	28	100
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	72%	100%	80	100	100
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	85%	100 %	100 %	80	100
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70	80%	100 %	100 %	70	100
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80	85%	100 %	95 %	80	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70	80%	100 %	95 %	70	100
--	--	---	----	-----	-------	------	----	-----

5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75	80%	100	100	83	100
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas	93	94%	100	100	93	100
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	97%	100	100	96	100
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70 %	80%	100	100	70	100
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	85%	100	100	80	100
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80 %	85%	100	100	80	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70 %	80%	100	100	70	100
--	--	---	------	-----	-----	-----	----	-----

		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	100	100	100	100
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsaryakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %

➤ Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.

- Sasaran Kegiatan :

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.

a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada Lapas Dompus ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %.

b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Pemberian layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas kepada Tahanan /Narapidana/Anak pada Lapas Dompus ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %. Lapas Dompus memiliki 4 perawat yang handal terdiri dari 2 JFT dan 2 JFU. Setiap hari perawat melaksanakan kontrol keliling memantau kesehatan Tahanan/Narapidana. Selain itu telah dibuatkan jadwal on call setiap malamnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan setiap saat dan pada saat ini Lapas Dompus bekerja sama dengan Puskesmas Dompus Barat untuk melakukan Tindakan preventif dan pengecekan oleh dokter pada setiap minggu nya.

- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.
- IKK Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 97 %. Pada tahun 2023, Tahanan dan Narapidana perempuan tidak ada yang sedang hamil atau memiliki anak bawaan. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut dan capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
- IKK Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 80 %. Pada tahun 2023 Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental telah dilakukan penanganan dan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Dompus barat dan juga pihak keluarga. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- e. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
- IKK Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 85 % dan telah terlaksana 100 %. Pada tahun 2023, terdapat 16 orang lansia yang semuanya adalah laki-laki. LapasDompus memiliki 4 perawat yang handal terdiri dari 2 JFT dan 2 JFU. Setiap hari perawat melasaknakan kontrol keliling memantau kesehatan Tahanan/Narapidan khususnya para lansia selain memeriksa kesehatan yang datang ke klinik Lapas. Juga telah dibuatkan jadwal on call setiap malamnya apabila terjadi hal yang tidak di inginkan setiap saat.
- f. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
- Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. khususnya pada Lapas Kelas IIB Dompus pada tahun 2023 terdapat perbedaan dari tahun 2022. Hal ini

disebabkan oleh intensnya pemanfaatan media maupun secara langsung memberikan makanan dan minuman kepada warga binaan pemasyarakatan terkait penyediaan sarana pelayanan dan pemberian layanan yang dilakukan Lapas Kelas IIB Dompu. Didukung dengan kemampuan SDM pada Lapas Kelas IIB Dompu yang cakap dan memiliki kemampuan public speaking sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Kemudian meminta masyarakat untuk memberikan penilaian sebagai saran dan masukan untuk perbaikan kedepan bagi Lapas Kelas IIB

Dompu untuk lebih baik lagi dan mendukung pelaksanaan program Lapas Dompu Menuju WBK/WBBM.

- g. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif pada Lapas Dompu ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %. Pada data yang tercatat terdapat 2 orang penderita HIV-AIDS. Dimana perawat setiap bulannya memberikan obat dan memantau setiap hari kondisinya. Selain itu, subsidi keperawatan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Dompu dalam hal ini yaitu Puskesmas Dompu Barat untuk memberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan TB kepada Tahanan/Narapidana.

- Sasaran Kegiatan :

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian IKK Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian tidak terdapat pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 80 % dan telah

mencapai realisasi sebesar 80 % sehingga telah melebihi target yang ditentukan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran Wali Kamar yang telah dibentuk pada Lapas Kelas IIB Dompu yang setiap saat memantau perkembangan Tahanan/Narapidana pada kamar hunian yang menjadi kamar walinya. Tentunya Wali ini di tunjuk dan ditugaskan dengan memperhatikan

kemampuan syarat-syarat menjadi Wali yang kemudian ditugaskan melalui Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh Kalapas. Data yang diperoleh dari para wali ini setelah dihimpun di peroleh 300 orang yang mendapatkan kategori memuaskan dari jumlah Tahanan/Narapidana yang ada yaitu 375 orang dengan persentase sebesar 80 %.

- b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Lapas Kelas IIB Dompu pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022. Walaupun nilai target ditahun 2023 lebih besar yaitu 99% sedangkan tahun 2022 yaitu 98% target, terjadi peningkatan sebesar 1 %. Hal ini tentunya upaya pemenuhan hak yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Dompu khususnya bagian registrasi yang mengusulkan WBP yang telah memenuhi syarat. Tentu saja WBP yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dimana berkelakuan baik ini dibuktikan dengan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Dompu dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan untuk diusulkan remisi dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi.

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Lapas Kelas IIB Dompu pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022. Walaupun nilai target ditahun 2023 lebih besar yaitu 85% sedangkan tahun 2023 yaitu 80%, Terjadi peningkatan sebesar 5 %. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk memenuhi hak WBP dan sebagai salah satu solusi mengatasi overkapasitas yang ada di Lapas Dompu. Tentunya WBP yang diberikan di usulkan telah memenuhi syarat.

- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Semua narapidana di lapas kelas IIB dompu mendapat hak pendidikan sesuai dengan porsinya masing masing terutama pendidikan mengenai agama

- e. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

IKK Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 13 %. Pada tahun 2023 tidak ada Narapidana resiko tinggi. Sehingga tidak diperlukan tindaklanjut dan capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

- f. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada Lapas Kelas IIB Dompu pada tahun 2023 dan tahun 2022 mencapai 100 %. Walaupun target yang diberikan berbeda dimana tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 namun tetap terlaksana walaupun adanya kendala yaitu ditengah masa pandemi covid-19. Namun Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan menjalin kerjasama dengan forkopimda dan telah dilaksanakan PKS untuk program pembinaan kemandirian yang telah diprogramkan dengan Dinas terkait.

- g. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
Banyak narapidana yang bekerja produktif dengan melakukan kegiatan yang dapat menunjang aktivitas mereka selama di dalam

- Sasaran Kegiatan : 3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

- a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Lapas Kelas IIB Dompu memiliki target ditahun 2023 sebesar 85 % sedangkan tahun 2022 yaitu 80 % namun realisasi yang telah dicapai adalah 100 %. Sarana dan prasarana layanan pengaduan telah disediakan melalui berbagai media, baik media sosial, kontak pengaduan dan melaporkan langsung ke Lapas Dompu.

Laporan pengaduan melalui media sosial dan kontak pengaduan akan dilayani oleh operator yang menangani, sedangkan laporan langsung akan di layani oleh petugas yang telah ditunjuk. Pada tahun 2023 tidak terdapat laporan pengaduan.

- b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Pada tahun 2022 70% dan tahun 2023 yaitu 80%, pencegahan gangguan kamtib dapat terlaksana 100 %. Penggeledahan rutin maupun insidental dilaksanakan baik oleh jajaran pengamanan maupun seluruh pegawai. Selain itu, Lapas Dompu juga sering melaksanakan penggeledahan gabungan bersama polisi, TNI dan BNNK Kab.Bima. dan juga dilakukan mutasi Narapidana untuk mengurangi overkapasitas pada Lapas Dompu sehingga situasi aman dan kondusif tetap terjaga. Terdapat beberapa kendala diantaranya air yang sering macet/ kering, listrik sering padam, tembok dan kawat berduri yang sudah tidak layak serta masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang keamanan di lapas.
- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 memiliki persentase target sebesar 85 %. Target ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 75 %. Akan tetapi target realisasi yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 95 %. Tercatat 2 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 namun telah ditindak lanjuti semua dengan dilaksanakan pemeriksaan oleh bagian Kamtib.
- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas pada tahun 2023 memiliki persentase target sebesar 80 %. Realisasi yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 95 %. Terdapat 2 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 namun telah ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh Tahanan/Narapidana agar tidak melakukan pelanggaran guna terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif serta memerintahkan kepada regu pengamanan pada saat melaksanakan tugas untuk meningkatkan intensitas kontrol keling di dalam blok.

- Sasaran Kegiatan : 4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.
 - a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Tersusunnya dengan baik dokuimen rencana kerja anggaran upt pemsarakatan dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan bulanan keuangan yang setiap bulannya di laporkan
 - b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
Presentasi pengelolan BMN yang baik di mulai di tahun 2022 di karnakan pada tahun 2021 IKK ini belum ada dan di tahun 2023 ini pengelolaan BMN tekah diklakukan dengan baik
 - c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan
Data dan peningkatan pgawai pemsarakatan telah termutahirkan dengan baik di buktikan dengan terkelolanya data kepegawaian dengan baik di tahun 2022 dan Tahun 2023.
 - d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Presentasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang baik dibuktikan dengan segala pembuatan dan pelaksanaan dokumen anggaran pada tahun 2023 ini telah terlaksana dengan baik dan tetap disampaikan setiap bulannya
 - e. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Jumlah Layanan Perkantoran
Jumlah layanan perkantoran pada tahun 2023 ini telah terlaksana dengan baik sehingga dapat menunjang dengan baik operasional di kantor
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi pada tahun ini telah terpenuhi sehingga dapat menunjang pelaksanaan operasional kantor dengan baik dan pada Tahun 2023 ini Lapas Dompu tidak Memiliki Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Tetapi Memiliki Belanja Modal Perbaikan Instalasi listrik.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kanwil.

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Rencana Target		
			2023	2023	2023	2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	85	80	83	84
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	85 %	80%	90%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	85 %	80%	90%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	85%	80%	90%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	80 %	65%	70%	75%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100 %	98%	99%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang	100 %	15%	17%	19%

		Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin				
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	100 %	28%	31%	34%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	100 %	67%	72 %	77 %
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	100 %	70%	80%	90%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100 %	70%	80%	90%
5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100 %	93%	94%	95%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100 %	96%	97%	98%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	100 %	70%	80%	90%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	100 %	80%	85%	90%

		yang mengalami gangguan mental dapat tertangani				
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	80%	85%	90%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	100 %	70%	80%	90%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna / korban penyalahgunaan narkoba	100 %	25%	27 %	29 %
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

- Langkah-langkah untuk dapat mencapai target sesuai Renstra Kantor Wilayah
 1. Memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga.
 2. Menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan dengan memperhatikan sasaran-sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden.
 3. Menyusun sampai dengan tingkat program dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing program.
 4. Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masing-masing K/L sesuai dengan kelompok karakteristik K/L. Detail kinerja dan rencana pendanaan program/kegiatan yang dibiayai disusun dalam matriks Kinerja K/L dan matriks Pendanaan K/L.



B. REALISASI ANGGARAN

Lapas Kelas IIB Dompu memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 Revisi Ke-1 sebesar Rp.8.966.383.000,-. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.743.779.956 atau sebesar 64.06 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.420.960.000	3.442.086.503	3.084.664.484	90.17
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.420.960.000	3.442.086.503	3.084.664.484	90.17
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.420.960.000	3.065.978.084	281.001.916	91.60
5252.BDC.0 02	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	94.580.000	29.242.000	65.338.000	30.92
051	Pembinaan Kepribadian	65.684.000	18.244.000	47.440.000	27.78
052	Layanan Integrasi dan TPP	28.896.000	10.998.000	17.898.000	38.06
5252.BDC.0 04	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3.223.280.000	3.036.736.084	186.543.916	94.21
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	3.223.280.000	3.036.736.084	186.543.916	94.21
5252.BDC. 006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	29.120.000	0	29.120.000	0
051	Perencanaan	1.040.000	0	1.040.000	0
052	Pelaksanaan	26.640.000	0	26.640.000	0
053	Evaluasi dan Pelaporan	1.440.000	0	1.440.000	0
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	73.980.000	18.686.400	55.293.600	25.26
5252.BHB.0 02	Layanan Keamanan dan Ketertiban	73.980.000	18.686.400	55.293.600	25.26
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	7.440.000	4.260.000	3.180.000	57.26

052	Pengawasan	66.540.000	14.426.400	52.113.600	21.68
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.545.423.000	2.659.115.472	2.886.307.528	47.95
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5.545.423.000	2.659.115.472	2.886.307.528	47.95
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.404.058.000	2.565.689.882	2.838.368.118	47.48
6231.EBA.956	Layanan BMN	28.730.000	13.295.200	15.434.800	46.28
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	12.230.000	5.295.200	6.934.800	43.30
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	16.500.000	8.000.000	8.000.000	48.48
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	4.380.000	903.000	3.477.000	20.62
051	Penyediaan Informasi Publik	1.980.000	500.000	1.480.000	25.25
052	Kerja Sama	2.400.000	403.000	1.997.000	16.79
6231.EBA.962	Layanan Umum	30.490.000	18.214.596	12.275.404	59.74
051	Urusan Umum	30.490.000	18.214.596	12.275.404	59.74
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.340.458.000	2.533.277.086	2.807.180.914	47.44
001	Gaji dan Tunjangan	4.353.994.000	2.147.727.206	2.206.266.794	49.33
002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	986.464.000	385.549.880	600.914.120	39.08
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	69.965.000	69.948.999	16.001	99.98
6231.EBB.971	Layanan Prarana Internal	69.965.000	69.948.999	16.001	99.98
051	Gedung dan Bangunan	69.965.000	69.948.999	16.001	99.98
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.780.000	0	9.780.000	0

6231.EBC.9 54	Layanan Manajemen SDM	9.780.000	0	9.780.000	0
051	Pembinaan Kepegawaian	9.780.000	0	9.780.000	0
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	61.620.000	23.476.591	38.143.409	38.10
6231.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.230.000	9.022.000	3.208.000	73.77
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	12.230.000	9.022.000	3.208.000	73.77
6231.EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.070.000	0	8.070.000	0
051	Penyusunan Laporan Kinerja	8.070.000	0	8.070.000	0
6231.EBD.9 55	Layanan Manajemen keuangan	10.970.000	5.147.091	46.92	5.822.909
051	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	10.970.000	5.147.091	46.92	5.822.909
6231.EBD.9 61	Layanan Reformasi Kinerja	30.350.000	9.307.500	21.042.500	30.67
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM)	30.350.000	9.307.500	21.042.500	30.67

- Analisis Pelaksanaan Anggaran

Program 1 : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

a. *Klasifikasi Rincian Output* : a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

KRO Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 3.346.980.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 3.065.978.084 dengan sisa sebesar Rp. 281.001.916 dan persentase penyerapan sebesar 91.60 %. Sudah di lakukan penyerapan dengan maksimal

b. *Klasifikasi Rincian Output* : b. Operasi Bidang Keamanan

KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 73.980.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 18.686.400 dengan sisa sebesar Rp. 55.293.600 dan persentase penyerapan sebesar 25.26 %. Kurangnya penyerapan anggaran KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu disebabkan masih ada anggaran tidak terserap pada komponen pengawalan untuk Mutasi Narapidana sebesar Rp. 32.193.600 dikarenakan pembatasan mutasi Narapidana guna mencegah penyebaran Covid-19 di masa Pandemi.

Program 2 : Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

a. *Klasifikasi Rincian Output* : Layanan Dukungan Manajemen Internal

RO Layanan BMN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 28.730.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 13.295.200 dengan persentase penyerapan sebesar 46.28 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.434.800. terdapat pada subkomponen 051 Penatausahaan dan Pengelola BMN sebesar Rp.6.934.800 karena adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Hubungan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 4.380.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 903.000 dengan persentase penyerapan sebesar 20.62 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.477.000. terdapat pada subkomponen 052 Kerja sama sebesar Rp.1.997.000 karena adanya sisa anggaran dari belanja ATK.

RO Layanan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 30.490.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 18.214.596 dengan persentase penyerapan sebesar 59.74 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 12.275.404. terdapat pada subkomponen 051 Urusan Umum sebesar Rp.12.275.404 karena adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Perkantoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 5.340.458, telah di realisasikan sebesar Rp. 2.533.277.086 dengan persentase penyerapan sebesar 47.44 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.807.180.914. terdapat pada subkomponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.2.186.691.794.

b. *Klasifikasi Rincian Output* : Layanan Sarana dan Prasarana Internal

RO Layanan Prasarana Internal pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 69.965.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 69.948.999 dengan persentase penyerapan sebesar 99.98 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 16.001 pada biaya belanja modal Gedung dan Bangunan.

c. *Klasifikasi Rincian Output* : Layanan Manajemen SDM

RO Layanan Manajemen SDM pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 9.780.000, Belum terealisasi dikarenakan belum ada kegiatan pembinaan FMD (Fisik Mental dan Disiplin)

d. *Klasifikasi Rincian Output* : Layanan Manajemen Kinerja Internal

RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 61.620.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 23.476.591 dengan persentase penyerapan sebesar 38.10 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 38.14.409 dikarenakan pada biaya perjalanan dinas akibat pembatasan kegiatan secara langsung digantikan dengan melalui zoom.



Table 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran		Penyerapan Anggaran		Persentase Penyerapan	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
	Tahun 2022						
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Rp. 9.286.879.000	Rp. 8.966.383.000	Rp. 9.003.178.410	Rp. 5.743.779.956	96,95 %	64.06%
	Tahun 2023						
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
2	Program Dukungan Manajemen						

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran Lapas Kelas IIB Dompus pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.966.383.000 lebih kecil dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9.286.879. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 Lapas Dompus tidak memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin dan kegiatan kemandirian yang tidak sebesar anggaran tahun 2022. Realisasi persentase penyerapan anggaran di tahun 2023 sebesar 64.06% sedangkan di tahun 2022 sebesar 96.95 %, mengalami penurunan sebesar 32.89 % disebabkan laporan kinerja ini adalah laporan Semester I, Sehingga akan mencapai nilai maksimal pada saat laporan Semester II akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2022. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu dengan membandingkan realisasi IKK dengan target IKK.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu pada 2023 Semester I sudah maksimal dengan rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 64,06 %. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

B. Langkah / Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2023 dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai dan bersurat ke kantor wilayah dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
4. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis.
5. Pengajuan RKBMN Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan seperti laptop, printer, alat kegiatan kerja dan produksi bagi Narapidana, serta alat masak kebutuhan bahan makanan narapidan (WBP).
7. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasarakatan maupun terhadap petugas pemasarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. Halik
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM NTB



ROMI YUDIANTO
NIP. 197706261997031001



Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Dompu



H. A. HALIK
NIP. 196712311989031005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU DENGAN KEPALA
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
		4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	-
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	-

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.420.960.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.420.960.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.545.423.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.545.423.000,-

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM NTB



Romi Yudianto
NIP. 19770626 199703 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Dompu



H. A. Halk
NIP. 19671231 198903 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A Halik

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 11 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Dompu



H. A. Halik
NP. 19671231 198903 1 005

LAMPIRAN

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPADA PEGAWAI

TAHUN 2023





LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

NOMOR : W.21.PAS.PAS-2062-KP.04.01 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

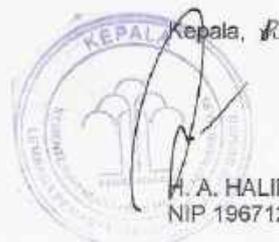
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jagka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
DOMPU

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang Namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.
- KEDUA : Tim bertugas menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Seksi Binadik dan Giatja Bagian Tata Usaha sebagai Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompus
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Kepala, *R*

A. A. HALIK
NIP 19671231 198903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU**

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.
Nomor : W.21.PAS.PAS.3-2062-KP.04.01 Tahun 2022
Tanggal : 5 Desember 2022

**Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu**

Ketua : Murdahim, S.H.
(Kasi Binadik dan Giatja)

Sekretaris : Ahmad, S. Sos
(Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan)

Koordinator : Dahlan, S.Sos
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

Anggota : 1. Fauzi Fauzan, SH
(Pengelola Data Kepegawaian)
2. Aminudin
(Pengelola Data Kepegawaian)
3. Zulfard Qaizar
(Pengelola Data Kepegawaian)
4. Gede Dino Permana Putra
(Pengelola Keuangan)



Kepala, R

H. A. HALIK
NIP 19671231 198903 1 005

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN LAPAS
KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2023



- Layanan Integrasi dan TPP (Sidang TPP)



- Penyuluhan Hukum



- Pembinaan Kerohanian dan kerja sama bersama Departemen Agama Dompu



- Pembinaan Kemandirian



- Penyuluhan Kesehatan



- Penanganan Penyakit HIV/AIDS dan TB



- Penggeledahan



- Pemindahan Narapidana



- Apel Penggeledahan bersama APH



- Pemeliharaan Perkantoran



Pembangunan Zona Integrit







